

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2021**

**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN ACEH (567392)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN (09)
KEMENTERIAN PERTANIAN (018)**

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021



Jl. Panglima Nyak Makam No.27, Lampineung- Banda Aceh 23125
Telepon: (0651) 7551811, Fax: (0651) 7552077, email: bptp_aceh@yahoo.co.id
bptp-aceh@litbang.pertanian.go.id, Website: www.nad.litbang.pertanian.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPTP Aceh adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPTP Aceh mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPTP Aceh. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Banda Aceh, 31 Desember 2021

Kepala Balai,



Ir. M. Ferizal, M. Sc

NIP. 19650291992031002

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Piutang Jangka Panjang

C.4. Aset Lainnya

C.4.1. Aset Tak Berwujud

C.4.2. Aset Lain-lain

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

C.6. Ekuitas

C.6.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

D.4. Beban Barang dan Jasa

D.5. Beban Pemeliharaan

- D.6. Beban Perjalanan Dinas
- D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
- D.8. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
- D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi
- D.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.4.2. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung
 - E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
 - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BPTP Aceh yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banda Aceh, 31 Desember 2021

Kepala Balai,



Ir. M. Ferizal, M. Sc

NIP. 19650291992031002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPTP Aceh Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp61.027.580,00 atau mencapai 21,81% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp279.840.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp15.575.685.893,00 atau mencapai 97,44% dari alokasi anggaran sebesar Rp15.985.030.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp171.459.114.902,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp164.436.307,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp171.153.012.137,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp141.666.458,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp13.383.283,00 dan Rp171.445.731.619,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp61.027.580,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp17.135.770.418,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-17.074.742.838,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp50.730.000,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-17.024.012.838,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp172.955.086.144,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-17.024.012.838,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan ditambah

Transaksi Antar Entitas sebesar Rp15.514.658.313,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp171.445.731.619,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BPTP ACEH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020**

Uraian	Catatan	31 Desember 2021			31 Desember 2020
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	279.840.000,00	61.027.580,00	21,81	90.703.736,00
Jumlah Pendapatan		279.840.000,00	61.027.580,00	21,81	90.703.736,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	6.020.400.000,00	5.990.374.512,00	99,50	6.116.764.161,00
Belanja Barang	B.4.	9.814.630.000,00	9.554.531.381,00	97,35	3.962.809.717,00
Belanja Modal	B.5.	150.000.000,00	30.780.000,00	20,52	1.507.100.000,00
Jumlah Belanja		15.985.030.000,00	15.575.685.893,00	97,44	11.586.673.878,00

II. NERACA

BPTP ACEH
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET			
Aset Lancar			
Persediaan	C.1.1.	164.436.307,00	122.525.057,00
Jumlah Aset Lancar		164.436.307,00	122.525.057,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	148.263.738.880,00	148.263.738.880,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	11.977.896.732,00	11.977.896.732,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	24.052.918.437,00	24.022.138.437,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	288.381.000,00	288.381.000,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	60.750.000,00	60.750.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6.	222.000.000,00	222.000.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7.	-13.712.672.912,00	-12.104.940.991,00
Jumlah Aset Tetap		171.153.012.137,00	172.729.964.058,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.4.1.	11.673.573,00	11.673.573,00
Aset Lain-lain	C.4.2.	1.137.995.000,00	1.137.995.000,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3.	-1.008.002.115,00	-1.003.388.751,00
Jumlah Aset Lainnya		141.666.458,00	146.279.822,00
Jumlah Aset		171.459.114.902,00	172.998.768.937,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1.	13.383.283,00	43.682.793,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		13.383.283,00	43.682.793,00
Jumlah Kewajiban		13.383.283,00	43.682.793,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.6.	171.445.731.619,00	172.955.086.144,00
Jumlah Ekuitas		171.445.731.619,00	172.955.086.144,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		171.459.114.902,00	172.998.768.937,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

BPTP ACEH LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	61.027.580,00	75.283.470,00
JUMLAH PENDAPATAN		61.027.580,00	75.283.470,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	5.958.875.512,00	6.148.263.161,00
Beban Persediaan	D.3.	1.418.462.900,00	821.423.950,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	3.557.851.704,00	2.124.151.056,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	553.449.000,00	588.679.300,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	1.638.079.517,00	379.837.285,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.8.	1.916.706.500,00	0,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	480.000.000,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9.	1.612.345.285,00	1.699.413.651,00
JUMLAH BEBAN		17.135.770.418,00	11.761.768.403,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-17.074.742.838,00	-11.686.484.933,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.10.	48.020.000,00	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10.	98.750.000,00	23.515.266,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10.	0,00	5.831.000,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		50.730.000,00	17.684.266,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-17.024.012.838,00	-11.668.800.667,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BPTP ACEH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
EKUITAS AWAL	E.1.	172.955.086.144,00	173.127.917.364,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-17.024.012.838,00	-11.668.800.667,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	15.514.658.313,00	11.495.969.447,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	-1.509.354.525,00	-172.831.220,00
EKUITAS AKHIR	E.6.	171.445.731.619,00	172.955.086.144,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BPTP Aceh

Balai Pengkajian Teknologi Petanian (BPTP) Aceh didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan sebagai asset pelayanan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Pertanian di Propinsi Aceh. Tugas pokok BPTP Aceh melaksanakan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, BPTP Aceh menyelenggarakan Tupoksi :

Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;

Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;

Pelaksanaan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan;

Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;

Pemberian pelayanan teknik kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPTP Aceh. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

BPTP Aceh menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPTP Aceh dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPTP Aceh yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPTP Aceh adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
 - Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.
- b. Aset Tetap**
- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
 - Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
 - Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BPTP Aceh telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	261.240.000,00	261.240.000,00
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	18.600.000,00	18.600.000,00
Jumlah Pendapatan	279.840.000,00	279.840.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6.334.400.000,00	6.020.400.000,00
Belanja Barang Operasional	550.460.000,00	576.660.000,00
Belanja Barang Non Operasional	2.539.039.000,00	2.795.674.000,00
Belanja Barang Persediaan	1.766.894.000,00	1.419.138.000,00
Belanja Jasa	348.396.000,00	437.018.000,00
Belanja Pemeliharaan	572.140.000,00	545.140.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.026.000.000,00	1.641.000.000,00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	0,00	1.720.000.000,00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0,00	680.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.150.000.000,00	50.000.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.263.000.000,00	100.000.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.772.000.000,00	0,00
Jumlah Belanja	33.322.329.000,00	15.985.030.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp61.027.580,00 atau mencapai 21,81% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp279.840.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	18.600.000,00	1.957.000,00	10,52
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	261.240.000,00	59.070.580,00	22,61
Jumlah	279.840.000,00	61.027.580,00	21,81

Realisasi Pendapatan TA 2021 mengalami penurunan sebesar -32,72% dibandingkan TA 2020. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada BPTP Aceh adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	.%
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	1.957.000,00	15.608.000,00	-87,46
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0,00	15.420.266,00	-100,00
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	59.070.580,00	59.675.470,00	-1,01
Jumlah	61.027.580,00	90.703.736,00	-32,72

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2021 adalah sebesar Rp15.575.685.893,00 atau 97,44% dari anggaran belanja sebesar Rp15.985.030.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2021

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	6.020.400.000,00	5.992.364.620,00	99,53
Belanja Barang	9.814.630.000,00	9.554.531.381,00	97,35
Belanja Modal	150.000.000,00	30.780.000,00	20,52
Total Belanja Kotor	15.985.030.000,00	15.577.676.001,00	97,45

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Pengembalian Belanja		-1.990.108,00	0,00
Total Belanja	15.985.030.000,00	15.575.685.893,00	97,44

Dibandingkan dengan Tahun 2020, Realisasi Belanja TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 34,43% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya kegiatan diseminasi Teknologi Pertanian (PEN)
2. Anggaran Kegiatan Benih Sumber tahun 2021 mengalami kenaikan di bandingkan tahun 2020

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	.%
Belanja Pegawai	5.990.374.512,00	6.116.764.161,00	-2,07
Belanja Barang	9.554.531.381,00	3.962.809.717,00	141,11
Belanja Modal	30.780.000,00	1.507.100.000,00	-97,96
Total Belanja	15.575.685.893,00	11.586.673.878,00	34,43

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp5.990.374.512,00 dan Rp6.116.764.161,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2021 mengalami penurunan sebesar -2,07% dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Ada 5 Orang pegawai yang pensiun di Tahun 2021
2. Adanya beban uang makan PNS bulan Desember 2020 sejumlah Rp. 31.499.000,00 yang dibayarkan di bulan Januari 2021.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.992.364.620,00	6.098.852.265,00	-1,75
Belanja Lembur	0,00	17.912.000,00	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	5.992.364.620,00	6.116.764.265,00	-2,03
Pengembalian Belanja Pegawai	-1.990.108,00	-104,00	1.913.465,38
Jumlah Belanja	5.990.374.512,00	6.116.764.161,00	-2,07

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp9.554.531.381,00 dan Rp3.962.809.717,00. Realisasi belanja barang TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 141,11% dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. adanya penambahan Kegiatan Diseminasi Teknologi Pertanian (PEN)

Kode Satker	Kode Kegiatan	Akun	Nama Akun	Revisi DIPA	Belanja	Sisa
567392	1801.SDA.513.051.A	521241	Belanja Barang Non Operasional - - Penanganan Pandemi Covid-19	435.900.000	384.416.500	51.483.500
		521841	Belanja Barang Persediaan- Penanganan Pandemi Covid-19	292.878.000	275.922.000	16.956.000
		522192	Belanja Jasa- Penanganan Pandemi Covid-19	30.222.000	30.121.000	101.000
		524115	Belanja Perjalanan Dinas	241.000.000	199.702.500	41.297.500
567392	1801.SDA.513.051.B	521241	Belanja Barang Non Operasional- Penanganan Pandemi Covid-19	912.650.000	114.080.000	798.570.000
		521841	Belanja Barang Persediaan- Penanganan Pandemi Covid-19	12.000.000	-	12.000.000
		522192	Belanja Jasa- Penanganan Pandemi	15.000.000	2.000.000	13.000.000

			Covid-19			
		524115	Belanja Perjalanan Dinas – Penanganan Pandemi Covid-19	556.750.000	106.400.000	450.350.000
		526321	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Penanganan Pandemi Covid-19	103.600.000	-	103.600.000
		526322	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Penanganan Pandemi Covid-19	200.000.000	-	200.000.000
567392	1801.SDA.513.051.C	521241	Belanja Barang Non Operasional - - Penanganan Pandemi Covid-19	329.200.000	122.100.000	207.100.000
		521841	Belanja Barang Persediaan- Penanganan Pandemi Covid-19	20.000.000	9.600.000	10.400.000
		522192	Belanja Jasa- Penanganan Pandemi Covid-19	110.800.000	13.700.000	97.100.000
		524115	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000	26.470.000	173.530.000

2. Adanya selisih nilai beban barang dan jasa senilai Rp. 13.383.283,00 yang terdiri dari tagihan langganan listrik, air dan telepon.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	572.460.000,00	814.508.000,00	-29,72
Belanja Barang Non Operasional	2.697.385.301,00	1.062.215.500,00	153,94
Belanja Barang Persediaan	1.418.969.150,00	867.718.950,00	63,53
Belanja Jasa	286.806.913,00	249.850.682,00	14,79
Belanja Pemeliharaan	544.124.000,00	588.679.300,00	-7,57

Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.638.079.517,00	379.837.285,00	331,26
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	1.716.716.500,00	0,00	0,00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	679.990.000,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	9.554.531.381,00	3.962.809.717,00	141,11
Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	9.554.531.381,00	3.962.809.717,00	141,11

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp30.780.000,00 dan Rp1.507.100.000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar -97,96% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya pengurangan anggaran belanja modal dibandingkan tahun sebelumnya
2. Realisasi tahun 2021 baru Rp. 30.780.000,00 dari target Rp. 150.000.000,00 hal ini dikarenakan belanja modal tahun 2021 menggunakan dana PNBP, sedangkan PNBP tidak mencapai target

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	99.000.000,00	-100,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.780.000,00	1.408.100.000,00	-97,81
Jumlah Belanja Kotor	30.780.000,00	1.507.100.000,00	-97,96
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	30.780.000,00	1.507.100.000,00	-97,96

B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp30.780.000,00 dan Rp1.408.100.000,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 mengalami penurunan sebesar -97,81% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Realisasi tahun 2021 baru Rp. 30.780.000,00 dari target Rp. 150.000.000,00 hal ini dikarenakan belanja modal tahun 2021 menggunakan dana PNBP, sedangkan PNBP tidak mencapai target

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.780.000,00	1.408.100.000,00	-97,81
Jumlah Belanja Kotor	30.780.000,00	1.408.100.000,00	-97,81
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	30.780.000,00	1.408.100.000,00	-97,81

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp164.436.307,00 dan Rp122.525.057,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Barang Konsumsi	86.832.580,00	95.113.330,00
Bahan untuk Pemeliharaan	646.000,00	646.000,00
Bahan Baku	76.957.727,00	26.765.727,00
Jumlah	164.436.307,00	122.525.057,00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BPTP Aceh per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp148.263.738.880,00 dan Rp148.263.738.880,00. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	148.263.738.880,00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Masuk	12.085.322.000,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Keluar	-12.085.322.000,00
Saldo per 31 Desember 2021	148.263.738.880,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan tanah adalah berupa:

Reklasifikasi Masuk atas tanah kebun percobaan yang berlokasi di Bener Meriah yang dikarenakan kesalahan pencatatan untuk luas tanah kebun dari sebelumnya seluas 142.735 M2 menjadi 67.919 M2.

Mutasi kurang atas nilai Tanah senilai Rp. 12.085.322.000 (Dua Belas Milyar Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) berasal dari:

Reklasifikasi Keluar atas tanah kebun percobaan yang berlokasi di Bener Meriah yang dikarenakan kesalahan pencatatan untuk luas tanah kebun dari sebelumnya seluas 142.735 M2 menjadi 67.919 M2

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki BPTP Aceh per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp11.977.896.732,00 dan Rp11.977.896.732,00.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki BPTP Aceh per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp24.052.918.437,00 dan Rp24.022.138.437,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	24.022.138.437,00
Mutasi Tambah	
Pengembangan Nilai Aset	30.780.000,00
Saldo per 31 Desember 2021	24.052.918.437,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	-3.840.747.912,00
Nilai Buku per 31 Desember 2021	20.212.170.525,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

1. Mutasi tambah (pengembangan nilai aset) berupa renovasi papan nama aula BPTP Aceh dengan nilai Rp. 30.780.000,00

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki BPTP Aceh per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp288.381.000,00 dan Rp288.381.000,00.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki BPTP Aceh per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp60.750.000,00 dan Rp60.750.000,00.

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki BPTP Aceh per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp222.000.000,00 dan Rp222.000.000,00. yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian lebih lanjut dari Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki BPTP Aceh per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-13.712.672.912,00 dan Rp-12.104.940.991,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	11.977.896.732,00	-9.816.161.258,00	2.161.735.474,00
2.	Gedung dan Bangunan	24.052.918.437,00	-3.840.747.912,00	20.212.170.525,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	288.381.000,00	-55.763.742,00	232.617.258,00
4.	Aset Tetap Lainnya	60.750.000,00	0,00	60.750.000,00
Akumulasi Penyusutan		36.379.946.169,00	-13.712.672.912,00	22.667.273.257,00

C.4. ASET LAINNYA

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp11.673.573,00 dan Rp11.673.573,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Software	11.673.573,00
Jumlah	11.673.573,00

C.4.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki BPTP Aceh per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.137.995.000,00 dan Rp1.137.995.000,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPTP Aceh serta dalam proses penghapusan dari BMN.

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki BPTP Aceh per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-1.008.002.115,00 dan Rp-1.003.388.751,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	11.673.573,00	-11.673.573,00	0,00
2.	Aset Lain-lain	1.137.995.000,00	-996.328.542,00	141.666.458,00
Akumulasi Penyusutan		1.149.668.573,00	-1.008.002.115,00	141.666.458,00

C.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp13.383.283,00 dan Rp43.682.793,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada BPTP Aceh per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0,00	31.499.000,00

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	13.383.283,00	12.183.793,00
Jumlah	13.383.283,00	43.682.793,00

Utang kepada pihak ketiga sejumlah Rp. 13.383.283,00 terdiri dari: tagihan langganan listrik, air dan telepon.

C.6. EKUITAS

C.6. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp171.445.731.619,00 dan Rp172.955.086.144,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp61.027.580,00 dan Rp75.283.470,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	1.957.000,00	15.608.000,00	-87,46
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	40.100.000,00	32.700.000,00	22,63
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	18.970.580,00	26.975.470,00	-29,67
Jumlah	61.027.580,00	75.283.470,00	-18,94

1. Terjadi penurunan pendapatan dari Pengujian Laboratorium dikarenakan Pandemi Covid-19
2. Terjadi penurunan hasil kebun dikarenakan proses replanting tanaman
3. Benih Sumber yang ada belum terjual sepenuhnya dikarenakan belum masuk musim tanam
4. Pendapatan sewa gedung dan bangunan terjadi penurunan dikarenakan Rumah Negara banyak yang tidak ditempati dan untuk mess akibat Pandemi Covid-19 tidak ada penyewa.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp5.958.875.512,00 dan Rp6.148.263.161,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	4.017.384.060,00	4.148.203.400,00	-3,15
Beban Pembulatan Gaji PNS	57.382,00	58.209,00	-1,42
Beban Tunj. Anak PNS	98.439.814,00	102.169.400,00	-3,65
Beban Tunj. Beras PNS	240.651.660,00	212.263.020,00	13,37
Beban Tunj. Fungsional PNS	513.950.000,00	485.840.000,00	5,79
Beban Tunj. PPh PNS	19.503.206,00	18.159.202,00	7,40
Beban Tunj. Struktural PNS	25.200.000,00	32.760.000,00	-23,08
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	300.102.390,00	307.396.930,00	-2,37
Beban Tunjangan Umum PNS	123.265.000,00	130.505.000,00	-5,55
Beban Uang Lembur	0,00	17.912.000,00	-100,00
Beban Uang Makan PNS	620.322.000,00	692.996.000,00	-10,49
Jumlah	5.958.875.512,00	6.148.263.161,00	-3,08

Beban pegawai mengalami penurunan -3,08% dikarenakan ada 5 orang pegawai pensiun sepanjang tahun 2021.

1. Ada 5 orang pegawai yang pensiun di tahun 2021.
2. Adanya beban uang makan PNS bulan Desember 2020 sejumlah Rp. 31.499.000.00 yang dibayarkan di bulan Januari 2021.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.418.462.900,00 dan Rp821.423.950,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	159.759.050,00	88.593.850,00	80,33
Beban Persediaan konsumsi	1.255.298.850,00	732.380.100,00	71,40
Beban persediaan lainnya	3.405.000,00	450.000,00	656,67

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Jumlah	1.418.462.900,00	821.423.950,00	72,68

Beban persediaan naik 72,68% dibandingkan tahun 2020 dikarenakan adanya penambahan Kegiatan Diseminasi Teknologi Pertanian (PEN).

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.557.851.704,00 dan Rp2.124.151.056,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Bahan	477.145.100,00	561.182.500,00	-14,98
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1.658.500.201,00	0,00	0,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	561.740.000,00	501.033.000,00	12,12
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	228.248.000,00	-100,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	135.960.000,00	134.760.000,00	0,89
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	102.975.000,00	69.800.000,00	47,53
Beban Jasa Profesi	10.000.000,00	3.800.000,00	163,16
Beban Keperluan Perkantoran	436.500.000,00	451.500.000,00	-3,32
Beban Langganan Air	8.383.830,00	11.818.360,00	-29,06
Beban Langganan Listrik	124.982.748,00	124.452.894,00	0,43
Beban Langganan Telepon	31.664.825,00	37.556.302,00	-15,69
Beban Sewa	10.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	3.557.851.704,00	2.124.151.056,00	67,50

Realisasi beban barang dan jasa naik 67,50% dikarenakan:

1. Beban barang Non Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19
2. Beban jasa penanganan Covid-19

3. Beban sewa Kendaraan/ angkut calon benih.

Untuk lebih rinci Rekapitulasi Peruntukan Belanja Penanganan Pandemi Covid 19 dapat dilihat di Table Berikut :

AKUN	NM AKUN	REVISI DIPA	BELANJA	SISA	PENGUNAAN BELANJA
521241	Belanja Barang Non Oprasional-- Penanganan Pandemi Covid-19	435.900.000	430.816.500	5.083.500	Pendukung lapang, Bimtek dan Temu Lapang
521841	Belanja Barang Persediaan- Penanganan Pandemi Covid-19	292.878.000	292.820.000	58.000	Atk dan saprodi
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	30.222.000	30.121.000	101.000	honor Narasumber dan Saprodi
524115	Belanja Perjalanan Dinas	241.000.000	240.877.500	122.500	Perjalanan dinas
521241	Belanja Barang Non Oprasional- Penanganan Pandemi Covid-19	912.650.000	900.238.000	12.412.000	Pendukung lapang, Bimtek dan Temu Lapang
521841	Belanja Barang Persediaan- Penanganan Pandemi Covid-19	12.000.000	-	12.000.000	
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	15.000.000	12.000.000	3.000.000	Honor Nara sumber
524115	Belanja Perjalanan Dinas- Penanganan Pandemi Covid-19	556.750.000	555.911.237	838.763	Perjalanan dinas
526321	Belanja Barang Untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	103.600.000	103.600.000	-	
526322	Belanja Barang Untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	200.000.000	199.990.000	10.000	
521241	Belanja Barang Non Oprasional-- Penanganan Pandemi Covid-19	329.200.000	327.445.701	1.754.299	Bahan Pendukung Bimtek, Kosumsi, dan Sewa Tempat pertemuan
521841	Belanja Barang Persediaan- Penanganan Pandemi Covid-19	20.000.000	19.980.000	20.000	Atk Untuk Bimtek
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	110.800.000	47.300.000	63.500.000	Honor Nara sumber dan Honor Operator Vidcon
524115	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000	199.927.000	73.000	Perjalanan dinas
	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	23.000.000	13.554.000	9.446.000	Tes PCR

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp553.449.000,00 dan Rp588.679.300,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	171.139.000,00	167.101.000,00	2,42
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	144.992.000,00	180.000.000,00	-19,45
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	227.993.000,00	241.578.300,00	-5,62
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	8.650.000,00	0,00	0,00
Beban Persediaan suku cadang	675.000,00	0,00	0,00
Jumlah	553.449.000,00	588.679.300,00	-5,98

Beban pemeliharaan mengalami penurunan oleh beban pemeliharaan gedung dan bangunan di gues house, kebun KP Gayo dan KP Paya Gajah.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.638.079.517,00 dan Rp379.837.285,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	641.363.780,00	375.937.285,00	70,60
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	996.715.737,00	0,00	0,00

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	3.900.000,00	-100,00
Jumlah	1.638.079.517,00	379.837.285,00	331,26

Peningkatan beban perjalanan terjadi karena adanya penambahan kegiatan Diseminasi Teknologi Pertanian (PEN).

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.396.706.500,00 dan Rp0,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19	103.600.000,00	0,00	0,00
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	376.400.000,00	0,00	0,00
Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.916.706.500,00	0,00	0,00
Jumlah	2.396.706.500,00	0,00	0,00

Peningkatan beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat terjadi karena adanya penambahan kegiatan Diseminasi Teknologi Pertanian (PEN).

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.612.345.285,00 dan Rp1.699.413.651,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan

dan Amortisasi untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	953.231.563,00	939.947.032,00	1,41
Beban Penyusutan Irigasi	8.605.944,00	8.605.944,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	4.613.364,00	4.613.364,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	644.834.414,00	745.187.311,00	-13,47
Jumlah	1.612.345.285,00	1.699.413.651,00	-5,12

D.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-48.020.000,00	0,00	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	-5.831.000,00	-100,00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0,00	15.420.266,00	-100,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	8.095.000,00	-100,00
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	98.750.000,00	0,00	0,00
Jumlah	50.730.000,00	17.684.266,00	186,87

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp172.955.086.144,00 dan Rp173.127.917.364,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp-17.024.012.838,00 dan Rp-11.668.800.667,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp15.514.658.313,00 dan Rp11.495.969.447,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2021.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2021
Ditagihkan ke Entitas Lain	15.575.685.893,00
Diterima dari Entitas Lain	-61.027.580,00
Jumlah	15.514.658.313,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2021 saldo DDEL adalah sebesar Rp-61.027.580,00 sedangkan DKEL sebesar Rp15.575.685.893,00.

E.4.2. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-695,00.

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 171.445.731.619,00 dan Rp. 172.955.086.144,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Masih adanya hutang pada pihak ketiga berupa:

1. beban langganan listrik, air dan telepon.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

Uang makan bulan Desember 2020 untuk 46 pegawai dengan nilai Rp31.499.000,00 yang masih belum dibayar dikarenakan GU Nihil dan dibayarkan di bulan Januari 2021.